

PREMIUM PRICE PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN PRODUKSI BERSERTIFIKASI

Premium Price of Management of Certified Production Forest Resources

Rina Muhayah Noor Pitri

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat
npr_muhayah@yahoo.com

Abstract

Forest certification is a key issue in relation to the forest products industry. It's also a new trend market of forest products. Forest certification is a guarantee that the products resulting from the forest management process in accordance with the standard of sustainable forest resources management. Certification will be increasing the cost of management as an impact of fulfilling requirement on the criteria of the certified forest. The fundamental question whether the award of certified products has been accompanied by an increase in premium price for forest estate or only becoming as the cost that reducing profit for the forest estate. The aims of this research are: 1) to know the difference between the sales price of certified and non-certified wood, 2) to know the premium price on certified forests, 3) to identify the factors that influence the amount of premium price of the certified forest. Data collection were used by searching the document and literature reference on forest certification. The results showed that the premium price received from the certified timber is higher than non-certified timber. Certified wood with high quality has a premium price that is greater than the low-quality wood. The percentage of premium price received varied forest estate. Premium price sometimes insignificantly received by small-scale of timber estate. The revenue of premium price of certifies forest is influenced by the following factors: 1) The forest area to be certified, 2) Organizations that perform assessments, 3) Company / bodies / organizations that filed the certification, 4) he The country as a buyer of certified timber product 5) the facilitator in the market activities, 6) post-certification fee, and 7) the sales price.

Keywords: management, premium price, certification, forest, sustainable

PENDAHULUAN

Keprihatinan akan lingkungan mendorong terbentuknya pemanfaatan hasil hutan dengan pendekatan pengelolaan hutan. Kondisi ini dimulai karena ketidakpercayaan negara maju akan hasil hutan tropis yang dianggap dihasilkan dari kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar. Sertifikasi bertujuan menegaskan bahwa produk asal hutan seperti dari negara tropis memenuhi persyaratan yang ditetapkan yakni bersertifikat ekolabel, sebagai garansi bahwa produk-produk itu dihasilkan dari proses pengelolaan yang

sesuai dengan standar pengelolaan hutan yang lestari.

Sertifikasi hutan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan hutan, dan berpotensi menghasilkan keuntungan keuangan yang memadai dari sektor kehutanan. Sertifikasi hutan bertujuan untuk mengidentifikasi hutan yang dikelola untuk memenuhi standar kelestarian hutan yang telah disepakati dan terkadang juga untuk label bagi produk yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

Sertifikasi dimulai dengan fokus yang kuat untuk tujuan meningkatkan standar pengelolaan hutan, dan khususnya dapat berkontribusi untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dunia dengan fokus awal yang berorientasi pada hutan tropis. Meskipun sertifikasi hutan dimulai untuk menghadapi penggundulan hutan tropis, tetapi berdasarkan letak geografis hutan ternyata 60% hutan bersertifikat terletak di Amerika Utara dan 36% di Eropa pada tahun 2006. FAO (2004) menyatakan bahwa sertifikasi hutan muncul pada tahun 1990 dengan fokus awal pada hutan tropis, tetapi hanya mencakup 1,6% (3,6 juta hektar) dari seluruh kawasan hutan bersertifikat mengakibatkan seluruh dunia defisit pasokan kayu keras tropis yang bersertifikat.

Pasar untuk produk hutan bersertifikat, terutama produk kayu bersertifikat, terkonsentrasi di negara-negara Eropa (terutama Inggris Raya, Jerman, Belgia dan Belanda) dan Amerika Utara, yang memberikan harga premi untuk produk ramah lingkungan sehingga menjadi nilai tambah bagi pasar. Negara-negara seperti Jerman, Italia, yang Belanda, Polandia, Amerika Serikat, Brasil, Jepang dan Cina yang kompetitif di bidang produk kayu bersertifikat. Pengekspor utama produk-produk yang sedang disertifikasi adalah Malaysia, Hong Kong, Selandia Baru, Indonesia, Myanmar dan Cina.

Sertifikasi hutan di Indonesia mempunyai tujuan yang lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan pasar tetapi juga dimanfaatkan sebagai piranti membina pelaku industri untuk lebih meningkatkan daya saing produk dan jasanya. Sertifikasi hutan melibatkan audit atau pemeriksaan oleh pihak ketiga secara ketat, dan untuk bisa melewatinya.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 menetapkan kewajiban pemenuhan standar SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) atas produk kayu bagi usaha perkebunan untuk menjamin legalitas penuh produk kayu. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan

keraguan terhadap legalitas kayu Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional. SVLK juga dirancang sebagai dasar kesepakatan sukarela (VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia. VPA ditandatangani dan SVLK secara resmi menjadi landasan perdagangan produk kayu bagi kedua belah pihak pada September 2013.

Penelitian berupaya untuk mengungkapkan nilai positif dari pengelolaan hutan bersertifikasi. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui perbedaan harga penjualan antara kayu bersertifikat dan kayu tidak bersertifikat., 2) Mengetahui *Premium Price* pada hutan bersertifikat, 3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *Premium Price* hutan bersertifikat.

METODE PENELITIAN

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pendekatan penelusuran dokumen dan pustaka tentang sertifikasi hutan. Data yang dikumpulkan meliputi data (1) harga jual kayu bersertifikat dan tidak bersertifikat (2) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya sertifikasi hutan (3) faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual kayu bersertifikat (4) hasil penelitian yang relevan.

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dengan dokumen yang dianalisis (harga jual, biaya, dan aspek-aspek yang berhubungan dengan sertifikasi hutan) adalah dokumen dari pengelolaan hutan di negara China, Malaysia dan Indonesia (pengelolaan hutan di Wonogiri).

Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan melakukan beberapa kegiatan: 1) komparasi harga jual kayu bersertifikat dari beberapa lokasi penelitian, 2) Komparasi *premium price* yang mungkin

diperoleh dari beberapa negara. *Premium Price* yang akan dibandingkan adalah : 1) *Premium Price* dalam studi kasus di China, 2) *Premium Price* Menurut UNECEF dan FAO, 3) *Premium Price* desa di Indonesia, 4) *Premium Price* menurut CCIF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Harga Kayu

Walter K and Peter L (2005) melakukan pengamatan dilakukan selama 5 tahun dimulai dari pada bulan Januari tahun 2000 sampai bulan November tahun 2004. Pengamatan dilakukan pada tiga unit pengelolaan hutan yang berbeda di Sabah Malaysia. UPH 1 adalah bekas tebanan hutan Dipterocarpaceae yang telah disertifikasi sesuai standart FSC pada tahun 1997. Dikelola oleh Departemen Kehutanan Malaysia dan telah diadopsi oleh pemerintah Sabah sebagai aplikasi diseluruh negara bagian. UPH 1 telah disertifikasi sesuai standar nasional Malaysia untuk pengelolaan hutan berkelanjutan (Kriteria dan Indicator Malaysia, MC & I 2002) yang diperoleh pada bulan Februari 2004. UPH 2 dan 3 menunjukkan kondisi potensi sumberdaya yang serupa meskipun mereka lebih besar dari pada UPH 1. Urutan luas hutan dari yang terbesar adalah UPH 2 dengan luas 906.000 hektar, UPH 3 dengan luas 109.000 hektare dan yang luasannya paling kecil adalah pada UPH 1 yaitu hanya 55.000 hektar. Kayu yang dihasilkan dari UPH 1 dijual dengan sistem lelang dengan harapan sistem ini dapat meningkatkan daya saing diantara pembeli sehingga diharapkan harga log menjadi lebih tinggi. Tabel 1 memuat daftar harga jual kayu dari

Tabel 1. Rata-rata Harga kayu bersertifikat dan tidak bersertifikat

Spesies	Harga kayu bersertifikat FSC (UPH1)	Harga kayu tidak bersertifikat (UPH 2)	Harga kayu tidak bersertifikat (UPH 3)
	USD	USD	USD
Selangan Batu	193,35	121,77	108,93
Keruing	160,17	104,34	107,13
Kapur	143,29	96,35	107,13
Seraya kuning, putih	117,82	101,35	108,22
Seraya Merah	141,14	97,95	110,96
Jenis campuran	87,71	70,42	83,88

Sumber : Kollert and Lagan (2005)

Seluruh harga kayu dalam masing-masing kelompok spesies pada UPH 1 lebih tinggi dibandingkan dengan harga kayu dari kelompok spesies yang sama pada UPH 2 dan UPH 3. Tingginya harga kayu pada UPH 1 tersebut karena UPH 1 telah memiliki sertifikasi dari FSC, sedangkan UPH 2 dan UPH 3 belum memiliki label sertifikasi dari FSC. Persentase perbandingan harga dari masing-masing kelompok spesies antara UPH 1 dengan UPH 2 dan UPH 1 dengan UPH 3 tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan harga antara UPH 1, UPH 2 dan UPH 3.

Spesies	Perbedaan harga %	
	UPH FMU1 dgn FMU2 (FMU2 =100%)	UPH FMU1 dgn FMU3 (FMU3 =100%)
Selangan Batu	+ 59%	+ 77%
Keruing	+ 54%	+ 50%
Kapur	+ 49%	+ 34%
Seraya kuning, putih	+ 16%	+ 9%
Seraya Merah	+ 44%	+27%
Jenis campuran	+ 25%	+ 5%

Sumber : Kollert and Lagan (2005)

Hasil yang diperoleh dalam studi ini menunjukkan bahwa hutan yang bersertifikasi mencapai premi untuk kayu bersertifikat. Rata-rata nilai kayu bersertifikat dibandingkan dengan log tidak bersertifikat lebih tinggi 5% sampai dengan 77% tergantung pada kelompok spesies. Secara khusus kayu berkualitas tinggi (misalnya Selangan Batu, Keruing, Kapur) harga premi yang cukup besar (34% sampai 77%). Kayu kualitas rendah seperti Seraya dan jenis campuran memiliki harga premi lebih kecil jika dibandingkan dengan kayu berkualitas tinggi yaitu antara 5% sampai 44%.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa : 1) Terdapat perbedaan harga jual antara kayu bersertifikat dengan kayu tidak bersertifikat, 2) Besarnya perbedaan harga kayu bersertifikat dengan kayu yang tidak bersertifikat dipengaruhi oleh jenis kayu dan kualitas kayu, 3) Peluang kayu bersertifikat untuk mendapatkan *Premium Price* pada kasus ini ditentukan oleh besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi dan pasca sertifikasi. Kasus jenis dan kualitas kayu meningkatkan harga jual juga serupa dengan produk lain. Kasus penjualan pakaian dengan harga yang berbeda untuk jenis ukuran juga akan mempengaruhi harga jual barang tersebut (Anderson and Simester. 2008).

Perbandingan Premium Price untuk Hutan Bersertifikasi

- 1) *Premium Price* untuk Studi Kasus di Negara Cina: Perusahaan bersertifikat menyatakan sikap positif terhadap sebagian besar pernyataan mengenai sertifikasi dan pengaruhnya terhadap industri. Perusahaan mempunyai keyakinan bawa sertifikasi dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru (terutama pasar di Eropa dan Amerika Utara) dan mempertahankan pasar yang sudah ada. Tabel berikut menyajikan *premium price* di negara Cina.

Tabel 3. *Premium Price* untuk Negara Tujuan Penjualan Eropa, Amerika Serikat dan Kanada

Negara Tujuan Penjualan	Rata-rata <i>Premium Price</i> (%)
Eropa	6,3
Amerika Serikat	5,1
Kanada	1,5

Sumber : Yuan and Eastin, 2007

Premium Price yang diperoleh dari penjualan kayu bersertifikat oleh perusahaan di cina berbeda-beda. Penjualan kayu bersertifikat ke Eropa memperoleh *Premium Price* paling tinggi yaitu 6,3 %. Penjualan kayu bersertifikasi ke Amerika serikat memperoleh *Premium Price* 5,1% (hanya berbeda 1, 2% lebih kecil dari *Premium Price* untuk penjualan ke Eropa). Sedangkan *Premium Price* untuk penjualan kayu ke Kanada adalah 1,5%. *Premium Price* untuk penjualan kayu bersertifikat ke Kanada mempunyai persentase yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan dua negara tujuan lainnya (Eropa dan Amerika). Perbandingan *Premium Price* dari ketiga negara tujuan penjualan ini, tentunya membuat perusahaan lebih mengutamakan penjualan ke Eropa dan Amerika Serikat agar dapat memperoleh *Premium Price* yang lebih besar.

- 2) *Premium Price* Menurut UNECEF dan FAO: *Premium Price* pasar antara 12% dan 20% diperoleh untuk kayu bersertifikat FSC.
- 3) *Premium Price* di Hutan Rakyat di Indonesia: Bagi pelaku usaha di sektor perkayuan skala besar, memenuhi ketentuan standar sertifikasi mungkin tidak menjadi masalah, namun bagi pelaku usaha di sektor perkayuan skala kecil, banyak pertanyaan muncul terkait kemampuannya mengadopsi standar tersebut. Hutan dengan luasan kecil seperti hutan rakyat di Seloropuro dan Sumberejo, insentif harga atau *Premium Price* sebagai wujud penghargaan

bagi produk kayu yang dikelola lestari belum dapat dinikmati secara nyata.

Kasus di desa Indonesia terutama di Jawa tentang *Premium Price* untuk kayu bersertifikasi menunjukkan bahwa kayu sertifikasi yang dijual memperoleh *Premium Price* dengan persentase yang berbeda-beda. Terdapat beberapa rangkaian kegiatan lagi yang harus dilakukan untuk memperoleh *Premium Price*, seperti mencari pasar yang dapat membeli dengan harga premi, memperhitungkan biaya yang dikeluarkan agar dapat memperoleh *Premium Price*. Sertifikasi menimbulkan tambahan biaya yang signifikan bagi sektor perikanan skala kecil, namun sektor perikanan skala kecil tidak memperoleh manfaat, baik dalam hal akses pasar maupun *premium price* (Astana *et al.* 2014). Ketiadaan atau kurangnya *premium price*, terbatasnya pasar potensial, dan tingginya biaya dalam proses sertifikasi merupakan dasar dari kurangnya minat industri furniture kayu di Malaysia mengikuti sertifikasi (Ratnasingam *et al.* 2008).

Adanya sertifikasi hutan tersebut menuntut adanya kelembagaan lokal yang kuat. Kelembagaan lokal menjadi media penting dalam sertifikasi hutan rakyat. Keberadaan kelembagaan lokal dalam hal ini diharapkan bisa menjadi *social capital* yang dapat meningkatkan *premium price* bagi masyarakat atau petani hutan. Keberadaan kelembagaan atau fasilitator jangan dipandang hanya sebagai *economic capital* tetapi harus dipandang sebagai *sosial capital* yang harus dihargai dan dipertahankan (Sulistiyarningsih, 2010).

Beberapa hal yang mempengaruhi perolehan *Premium Price* sertifikasi hutan diantaranya adalah : 1) Luas hutan yang akan disertifikasi, 2) Organisasi yang melakukan penilaian sertifikasi, 3) Perusahaan/ badan/ lembaga yang mengajukan sertifikasi, 4) Negara yang menjadi tujuan penjualan kayu /produk bersertifikasi, 5) Fasilitator dalam kegiatan penjualan, 6) Biaya pasca sertifikasi, dan 7) Harga penjualan

Perbedaan premium price disebabkan oleh luas hutan yang berbeda

Duke University, dan the North Carolina DENR Division of Forest Resources merupakan dua organisasi pengelolaan hutan yang mendapatkan sertifikasi dari Lembaga yang sama tetapi memiliki luasan yang berbeda. Kedua organisasi ini mempunyai luasan hutan bersertifikasi yang berbeda, DFR dengan luasan 42.000 acre dan Duke 8.000 acre. *Duke University, dan the North Carolina DENR Division of Forest Resources* mendapatkan sertifikasi oleh *Sustainable Forestry Initiative* (SFI). Tabel berikut mengemukakan perbedaan *premium price* antara kedua organisasi tersebut.

Tabel 4. Perbandingan biaya sertifikasi hutan untuk luas hutan berbeda

Biaya (\$)	DFR (42.000 acre)	Duke (8.000 acre)
Biaya Inspeksi	11.526	8.839
Biaya Inspeksi per acre	2,744	1.105
Biaya Persiapan	5.850	24,600
Biaya Persiapan per acre	1.393	3,08
Total Biaya	17.376	33.439
Total Biaya per acre	4.137	4.180

Sumber : Cubbage *et al.* (2006)

Total biaya inspeksi dari DFR dengan luas hutan 42.000 acre adalah \$ 11.526, sedangkan rata-rata biaya per acre-nya \$ 2,744. Biaya persiapan DFR adalah \$5.850 dengan rata-rata per acre-nya \$ 1,393. Total biayanya sebesar \$ 17.376 dengan rata-rata per acre \$ 4,137. Biaya inspeksi untuk Duke dengan luasan hanya 8.000 acre adalah \$8.839 dan rata-rata per acre-nya adalah \$1,105. Biaya persiapannya sebesar \$ 24.600 dengan rata-rata \$3,08. Totalnya sebesar \$33.439 dan rata-ratanya \$4,180.

Luasan hutan yang lebih kecil memiliki biaya yang lebih besar per acre-nya. Persentase perbedaan biaya yang dikeluarkan untuk hutan dengan luasan

kecil (dari contoh di atas) adalah 4,3 % lebih besar dibandingkan dengan hutan yang mempunyai luasan lebih besar. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi hutan dengan luasan yang lebih kecil akan mempengaruhi besarnya *Premium Price* yang didapatkan.

Perbedaan besar biaya sertifikasi dengan lokasi yang sama tetapi berbeda lembaga atau badan yang melakukan penilaian sertifikasi

Tiga organisasi yang diamati yaitu Sustainable Forests–North Carolina State University, Duke University, and the North Carolina DENR Division of Forest Resources. Ketiga organisasi ini melakukan dua sertifikasi yaitu sertifikasi FSC dan SFI. Berikut adalah perbedaan biaya sertifikasi di hutan yang sama dengan lembaga sertifikasi yang berbeda :

Tabel 5. Perbedaan biaya sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang berbeda

Biaya	SFC	SFI
Biaya Inspeksi	78.450	37.325
Biaya Persiapan	29.887	66.012
Total Biaya	108.337	103.337

Sumber : Cubbage *et al.* (2006)

Dua lembaga sertifikasi (SFC dan SFI) yang melakukan sertifikasi di lokasi yang sama ternyata terdapat perbedaan total biaya yaitu \$108.337 untuk SFC dan \$103.337 untuk SFI. Besarnya perbedaan dari SFC dan SFI adalah sebesar 4, 84%. Kasus di Malaysia biaya sertifikasi CoC kayu di Malaysia mencapai RM 5,7/m³. Komponen biaya terbesar adalah biaya memenuhi persyaratan standar sertifikasi CoC (Noor Suryani *et al.* 2010).

Perusahaan/ badan/ lembaga yang mengajukan sertifikasi

Perusahaan yang mengajukan sertifikasi mempunyai kesiapan yang berbeda-beda dalam kegiatannya untuk memperoleh sertifikasi. Perbedaan kesiapan tersebut dapat mempengaruhi besarnya biaya yang akan dikeluarkan.

Tabel 6. Perbedaan Biaya Persiapan Awal Sertifikasi Hutan

Biaya (\$)	DFR (42.000 acre)	Duke (8.000 acre)
Biaya Persiapan	58.506	24,600
Biaya Persiapan per acre	1,393	3,08

Sumber : Cubbage *et al.* (2006)

Terdapat perbedaan biaya persiapan awal sertifikasi dari DFR dan DUKE. Walaupun luas hutan yang disertifikasi oleh DFR lebih besar tetapi biaya yang dikeluarkan untuk persiapan awal hanya \$1,393 per acre. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan suatu badan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi berbeda-beda.

Negara yang menjadi tujuan penjualan kayu /produk bersertifikasi

Kasus di Cina diberikan gambaran bahwa negara tujuan penjualan dapat mempengaruhi besarnya *Premium Price* yang dihasilkan (Yuan and Eastin, 2007). Pengiriman kayu bersertifikat dari China ke negara Eropa akan memiliki perbedaan *Premium Price* 1,2 % lebih besar dibandingkan dengan *Premium Price* yang diperoleh jika menjual kayu ke Amerika Serikat. Penjualan kayu bersertifikat dari China ke Eropa' memperoleh *Premium Price* 4,8% lebih besar dibandingkan *Premium Price* yang diperoleh jika melakukan penjualan ke Kanada. Walaupun penjualan ke Amerika Serikat menghasilkan *Premium Price* yang lebih kecil dari *Premium Price* penjualan ke Eropa, tetapi *Premium Price* penjualan ke Amerika Serikat 3,6 % lebih besar dibandingkan dengan penjualan kayu bersertifikat ke Kanada. Walaupun perbandingan *Premium Price* yang diperoleh untuk penjualan ke Kanada lebih kecil dibandingkan dengan penjualan ke Eropa dan Amerika Serikat, tetapi penjualan ke Kanada tetap menjadi salah satu tujuan bagi pasar kayu

bersertifikat dari China, karena dari penjualan ke Kanada, diperoleh *Premium Price* 1,5%. Kasus serupa juga dialami oleh negara Rumania dimana sertifikasi selain meningkatkan *premium price* juga reputasi yang baik terutama di negara-negara Eropa Barat (Halaalisan *et al.* 2013).

Alokasi Biaya untuk fasilitator dalam kegiatan Penjualan

Kasus di Seloroporo dan Sumberejo disebutkan bahwa *Premium Price* yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 50% untuk petani pemilik untuk mendorong agar tetap menanam, 25% untuk Forum Komunitas Petani Sertifikasi, dan 25% untuk Koperasi Mitra Sejahtera yang memfasilitasi petani dengan pembeli. Alokasi dana untuk fasilitator dari kasus Seloroporo dan Sumberejo di atas, akan mengurangi *Premium Price* yang diperoleh sebesar 25%.

Biaya Pasca Sertifikasi

Beberapa biaya yang harus dikeluarkan di antaranya adalah: kunjungan tahunan oleh tim sertifikasi, penambahan waktu kerja, jumlah pekerja, dan pelatihan staf. Pelatihan untuk staf berguna bagi peningkatan keterampilan staf agar mampu memenuhi hal-hal yang disyaratkan oleh tim sertifikasi (Cubbage *et al.* 2006).

Penjualan kayu/produk bersertifikasi

Harga kayu bersertifikasi dapat berbeda-beda. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi antara lain: Jenis kayu dan kualitas kayu. Jenis kayu akan mempengaruhi harga penjualan kayu per m³. Kualitas kayu yang tinggi yang ditujukan untuk pasar ekspor, akan mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu dengan kualitas rendah yang hanya dapat dipasarkan dipasar lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perbandingan antara harga kayu bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat dan perbandingan *Premium Price* dari beberapa studi kasus disimpulkan bahwa harga kayu bersertifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan harga kayu tidak bersertifikasi. Penjualan kayu bersertifikasi (dari kasus di China dan Wonogiri) mendapatkan *Premium Price* dengan persentase yang berbeda-beda. *Premium Price* untuk kayu bersertifikasi umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: luas hutan yang akan disertifikasi, organisasi yang melakukan penilaian sertifikasi, perusahaan/ badan/ lembaga yang mengajukan sertifikasi, negara yang menjadi tujuan penjualan kayu, biaya pasca sertifikasi, biaya fasilitator dalam kegiatan penjualan dan harga penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, E. T., Simester, D. I. (2008). Does Demand Fall When Customers Perceive That Prices Are Unfair? The Case of Premium Pricing for Large Sizes. *Marketing Science* 27(3): 492–500. doi 10.1287/mksc.1070.0323.
- Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W. F., Hardiyanto, G. (2014). Implikasi Biaya dan Manfaat Pelaksanaan SVLK Terhadap Sektor Perkayuan Skala Kecil. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11(3): 175 – 198.
- Frederick Cubbage, Daniel Richter, Michael Thompson, Susan Moore, Judson Edeburn, Michael Chesnutt, Joseph Cox, and Warren Boyette. (2006). *Forest Certification cost and Benefit: The Experience of Southern Center for Sustainable Forest*.
- Halalisan, A. F., M. Marinescu, B. Popa and IV. Abrudan. (2013). Chain of Custody Certification in Romania: Profile and Perceptions of FSC

- Certified Companies. *International Forestry Review*. 15(3): 305-314. doi: <http://dx.doi.org/10.1505/146554813807700137>.
- Noor Suryani, A. G., H. O. M. Shahwahid, P. A. Fauzi, R. Alias and R. P. Vlosky. (2011). Assessment of Chain of Custody Certification Costs for Sawn-wood Manufacturers in Peninsular Malaysia. *Journal of Tropical Forest Science* 23(2): 159–165.
- Ratnasingam, J., Macpherson, T. H., Ioras, F., Abrudan, I. V. (2008). Chain of Custody certification among Malaysian wooden furniture manufacturers: status and challenges. *International Forestry Review*. 10(1): 23–28.
- Richard, Z. D., Rebecca Butterfield. (2002). *Update on Initiatives Related to Small Forest Enterprises*. Rainforest Alliance.
- Sulistiyarningsih. (2010). Kapasitas Organisasi Lokal dalam Sertifikasi Hutan di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Studi Pemerintahan*. 1(1).
- Yuan Yuan and Ivan Eastin. (2007). *Forest Certification and Its Influence on the Forest Products Industry in China*. Cintrafor: Cina.
- Walter Kollert and Peter Lagan. 2005. *Do Certified Tropical Logs Fetch a Market Premium? A Comparative Price Analysis from Sabah, Malaysia*.